



Piyungan Penuhi Syarat Tempat Energi Listrik

JOGJA—Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyurvei calon lokasi Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Piyungan, Kabupaten Bantul.

Kiki Luqmanul Hakim & Luqas Subarkah
redaksi@jibinews.co

Pemerintah menargetkan proses peletakan batu pertama pembangunan fisik PSEL bisa dilakukan pada pertengahan 2026. Lahan yang disiapkan berada di kawasan eks Kelompok Badan Pengelola Unit (KBPU) di sisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dengan luas sekitar 5,8 hektare, yang merupakan aset milik Pemda DIY.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, menjelaskan saat ini tahapan utama yang dikerjakan pemerintah adalah penyiapan lahan serta kelengkapan infrastruktur pendukung. Proses ini juga menunggu revisi Peraturan Presiden No.35/2018 yang menjadi dasar pelaksanaan proyek PSEL.

Menurut Bambang, verifikasi lapangan terhadap calon lokasi PSEL

▶ Saat ini tahapan utama yang dikerjakan pemerintah adalah penyiapan lahan serta kelengkapan infrastruktur pendukung.

▶ Sektor hotel, restoran, dan kafe juga diharapkan berkontribusi dalam penyediaan sampah ke fasilitas PSEL.

di lahan eks KBPU TPA Piyungan seluas 5,8 hektare telah dilakukan, dan hasilnya dinilai positif. Tim verifikasi menilai area tersebut memenuhi syarat, dengan catatan perlu penyiapan jalur listrik dan

pasokan air yang memadai untuk mendukung operasional PSEL.

Selain menyiapkan lahan, lanjut Bambang, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan sarana pengangkut sampah atau *transporter* agar distribusi ke fasilitas PSEL dapat berjalan lancar.

Kapasitas pasokan sampah pun diharapkan meningkat dari sebelumnya 1.000 ton per hari menjadi sekitar 1.400 ton per hari, dengan kemungkinan kerja sama tambahan dari daerah sekitar seperti Kulonprogo, Gunungkidul, atau bahkan Klaten.

Piyungan Penuhi...

Sektor hotel, restoran, dan kafe juga diharapkan berkontribusi dalam penyediaan sampah ke fasilitas PSEL.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan proyek WTE masih dalam tahap awal pembahasan. Ia menyebut, penerapannya tidak hanya melibatkan Bantul, tetapi juga Kota Jogja dan Kabupaten Sleman.

"Saya belum bisa berkomentar banyak tentang itu, karena ini kan menyangkut tiga kabupaten. Ada Kabupaten Bantul, Kota Jogja, dan Kabupaten Sleman," ujar Halim, Minggu (12/10).

Menurutnya, proyek ini akan dijalankan oleh perusahaan Danantara dengan target minimal mengelola 1.000 ton sampah per hari agar proses konversi sampah menjadi energi listrik dapat berjalan optimal. "Itu proyek nasional, akan tetapi masing-masing kabupaten atau kota terutama tiga tadi, Bantul, Jogja, Sleman, harus bisa setor sampah minimal 1.000 ton per hari untuk menggerakkan mesin itu agar menghasilkan listrik,"

jasasnya.

Namun, kondisi terkini di Bantul menunjukkan jumlah sampah yang relatif menurun. Hal ini disebabkan adanya gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mulai berhasil menekan volume buangan ke TPA. "Karena ada gerakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, jumlah sampahnya jadi menurun. Begitu juga dengan sampah liar yang tidak terkelola, sekarang tinggal sekitar 30 ton per hari," jelasnya.

Di sisi lain, Kota Jogja masih menghasilkan sekitar 150 ton sampah per hari, sedangkan Kabupaten Sleman memiliki jumlah yang lebih besar lagi. Karena itu, kerja sama lintas wilayah menjadi syarat utama agar proyek WTE bisa beroperasi sesuai kebutuhan kapasitas.

Peninjauan Awal

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menjelaskan jawatannya masih terus berkoordinasi

dengan Pemkot Jogja, Pemkab Bantul, dan Pemkab Sleman. "Kami masih berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk persiapan PSEL," ujarnya, Sabtu (11/10).

Pemerintah Pusat sudah menggelar peninjauan awal calon lokasi PSEL di Piyungan, meskipun ia belum tahu hasilnya.

"Tim pusat meninjau awal calon lokasi PSEL, hasilnya nanti dilaporkan ke pusat," katanya.

Meski demikian sampai sekarang peraturan presiden (perpres) yang dijadikan sebagai pedoman program ini belum terbit sehingga belum diketahui detail teknis kelanjutannya. "Kami masih menunggu perpres," ungkapnya.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan dari koordinasi sejauh ini, Pemda DIY bersama kabupaten/kota bersangkutan sudah mengambil kesepakatan, tetapi belum disampaikan ke Pusat. "Kami akan *matur* [sampaikan] dulu ke Bapak Gubernur," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005